



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT KERJA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **APANI SAHARUDIN**
2. Jabatan : **ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
3. NHK : **488502**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

809.430.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 485 m2/96 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 183.950.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/96 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 72.480.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 296 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 390 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000
6. Tanah Seluas 1115 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/96 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/105 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. Tanah Seluas 500 m2 di KOTA JAMBI , WARISAN Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

164.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ETIOS VALCO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2007, WARISAN Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SCOOTER Tahun 2012, HIBAH



DENGAN AKTA Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 20.251.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 51.006.237

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.044.687.237

III. HUTANG

Rp. 55.805.553

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 988.881.684

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.